



DETERMINAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH: STUDI EMPIRIS

Andriani Karto¹⁾, Sandi Hasudungan Pasaribu²⁾, Herman Paulus Fonataba³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Nani Bili Nusantar, Indonesia

^{1.)} andrianikarto1975@gmail.com,

ARTICLE HISTORY

Received:

November 17, 2025

Revised

December 13, 2025

Accepted:

December 13, 2025

Online available:

Januari 23, 2026

Keywords:

Economic Growth, Human Development Index, Income Inequality, Poverty, Regional Development

*Correspondence:

Name: Andriani Karto

E-mail:

andrianikarto1975@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: Poverty and income inequality remain fundamental challenges in Indonesia's regional economic development, where, despite declining absolute poverty rates during decentralization, consumption inequality has significantly increased, offsetting the positive impacts of consumption growth on poverty reduction. Income inequality demonstrates a positive and substantial impact on poverty prevalence, while unemployment, human development, fiscal transfers, and employment structure significantly influence these phenomena through complex transmission mechanisms.

This study analyzes the determinants of poverty and income inequality in regional economic development contexts, examines the mediating role of income inequality in the relationship between macroeconomic determinants and poverty, and identifies heterogeneous patterns of determinants across regions with different geographical and structural economic characteristics.

Method: This quantitative explanatory research employs balanced panel data from 34 districts/cities during 2019-2023 (170 observations), utilizing Fixed Effect Model and Random Effect Model regression analysis with Generalized Method of Moments system estimation, mediation analysis using Baron and Kenny method, and heterogeneity analysis across urbanized, transitional, and rural regions.

Results: Income inequality emerges as the strongest determinant of poverty ($\beta = 18.45$, $p < 0.01$), followed by the open unemployment rate, the Human Development Index, and economic growth. The informal employment structure constitutes the strongest predictor of income inequality ($\beta = 0.0034$, $p < 0.01$). Income inequality serves as a partial mediator, with mediation proportions of 32% for the employment structure pathway and 24% for the economic growth pathway. Substantial heterogeneity exists across regional typologies, with HDI becoming critical in urbanized areas while income redistribution is more crucial in rural regions.

Conclusion: Integrated development policies encompassing the structural transformation of informal employment, human resource investment strengthening, and the implementation of inclusive growth with differentiated approaches based on regional typologies are recommended to reduce poverty and inequality effectively.

PENDAHULUAN

Problematika kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan fundamental dalam proses pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan absolut mengalami penurunan selama periode desentralisasi, namun ketimpangan konsumsi justru mengalami peningkatan yang signifikan pada periode yang sama, di mana ketimpangan yang meningkat telah mengimbangi dampak positif dari pertumbuhan konsumsi terhadap pengurangan kemiskinan. Fenomena ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok penduduk miskin. Dimana sering kali terjadi ketimpangan akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang mana kelompok miskin sering tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai sehingga sulit masuk ke pekerjaan yang produktif dan berpendapatan tinggi. Akses terbatas terhadap modal dan peluang usaha dimana masyarakat miskin sulit mendapatkan pinjaman, aset, atau dukungan usaha, sehingga tidak bisa memanfaatkan peluang ekonomi yang tumbuh. Konsentrasi ekonomi pada sektor dan wilayah tertentu terlihat dari pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di kota besar atau sektor tertentu, sementara daerah miskin tertinggal. Kebijakan publik yang kurang tepat sasaran dimana program pemerataan atau perlindungan sosial kadang tidak efektif atau tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan

Koefisien Gini sebagai indikator ketimpangan menunjukkan nilai yang lebih tinggi di kawasan perkotaan dibandingkan perdesaan di sebagian besar negara berkembang, mengindikasikan bahwa disparitas ekonomi memiliki dimensi spasial yang kompleks. Temuan empiris terkini dari berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kompleks antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan secara konsisten bersifat negatif, dimana penurunan tingkat kemiskinan sebesar 10 poin persentase berkaitan dengan peningkatan PDB per kapita antara 0,5% hingga 1,2% per tahun, sementara korelasi antara pertumbuhan dengan ketimpangan bersifat empiris yang rapuh dan dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada spesifikasi empiris dan pendekatan ekonometrik yang digunakan (Marrero & Servén, 2022). Di konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa lima faktor signifikan mempengaruhi ketimpangan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, proporsi pekerja informal sektor pertanian, dan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara enam faktor determinan yaitu ketimpangan pendapatan (Gini ratio), tingkat pengangguran, tingkat pendidikan / kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, inflasi atau tingkat harga kebutuhan dasar, belanja/pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial ditemukan berpengaruh terhadap kemiskinan termasuk ketimpangan itu sendiri (Wedi & Fathurrahman, 2025).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan (*gap*) penelitian yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis kemiskinan dan ketimpangan secara terpisah, tanpa mengeksplorasi mekanisme interaksi dan efek mediasi antara kedua fenomena tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Kedua, penelitian yang ada belum secara komprehensif menganalisis bagaimana determinan kemiskinan dan ketimpangan dapat berbeda antar wilayah dengan karakteristik geografis dan struktural ekonomi yang berbeda. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan dimensi kebijakan fiskal daerah, modal manusia, dan struktur ketenagakerjaan dalam satu kerangka analisis terpadu masih terbatas. Kondisi ini menghasilkan pemahaman yang parsial tentang dinamika kemiskinan dan ketimpangan dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kontribusi novelty melalui beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengembangkan model analisis terpadu yang menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara determinan ekonomi makro dan kemiskinan, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme transmisi pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, penelitian ini melakukan diferensiasi analisis berdasarkan karakteristik wilayah untuk mengidentifikasi pola determinan yang spesifik kontekstual, mengingat bahwa disparitas regional tetap persisten termasuk di tingkat kabupaten/kota dimana sebagian besar tata kelola pemerintahan telah bergeser, dengan perbedaan substantif dalam tingkat kemiskinan antar daerah. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan dimensi kebijakan pembangunan daerah yang mencakup aspek fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka analisis yang holistik, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional dan aplikatif bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan transfer fiskal terhadap tingkat kemiskinan di wilayah penelitian, pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan struktur ketenagakerjaan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah penelitian, ketimpangan pendapatan berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara determinan ekonomi makro

dengan tingkat kemiskinan di wilayah penelitian, dan perbedaan pola determinan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan karakteristik geografis dan struktural ekonomi yang berbeda?. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis dan mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan transfer fiskal terhadap tingkat kemiskinan di wilayah penelitian, Menganalisis peran ketimpangan pendapatan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara determinan ekonomi makro dengan tingkat kemiskinan di wilayah penelitian, dan Mengidentifikasi dan membandingkan pola determinan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan karakteristik geografis dan struktural ekonomi yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi pembangunan daerah, khususnya dalam memahami mekanisme interaksi antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan determinan ekonomi makro dalam konteks desentralisasi fiskal, Memperkaya literatur ekonomi regional dengan menyediakan bukti empiris tentang heterogenitas determinan kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dengan karakteristik yang berbeda, Mengembangkan kerangka analisis terpadu yang mengintegrasikan dimensi fiskal, modal manusia, dan struktur ketenagakerjaan dalam studi kemiskinan dan ketimpangan. Menyediakan basis empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang lebih tepat sasaran dan kontekstual sesuai karakteristik wilayah masing-masing, Memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif terkait alokasi anggaran pembangunan daerah, khususnya dalam prioritas belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, dan Menjadi rujukan bagi peneliti dan akademisi dalam melakukan kajian lanjutan terkait dinamika kemiskinan dan ketimpangan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan dan Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan fenomena multidimensional yang menjadi fokus utama dalam diskursus pembangunan ekonomi kontemporer. Konseptualisasi kemiskinan telah berkembang dari pendekatan unidimensional berbasis pendapatan menuju perspektif multidimensi yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan holistik. Dalam konteks pembangunan daerah, disparitas ekonomi mencerminkan ketidakmerataan distribusi sumber daya produktif yang berimplikasi pada diferensiasi akses terhadap peluang ekonomi antar segmen masyarakat. melalui hipotesis U-terbalik (*inverted U-curve hypothesis*) mengemukakan bahwa relasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan bersifat non-linear, dimana pada tahap awal pembangunan ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun seiring pencapaian tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Namun, evidensi empiris kontemporer menunjukkan kompleksitas yang lebih substansial, dimana pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mentransmisikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat (Chaniago et al., 2025). Paradigma pembangunan inklusif menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan yang memastikan partisipasi luas dan distribusi manfaat yang equitable, bukan semata-mata akselerasi pertumbuhan agregat.

Determinan Struktural Kemiskinan di Tingkat Daerah

Literatur empiris mengidentifikasi berbagai determinan struktural yang mempengaruhi dinamika kemiskinan di level regional. (Miranti et al., 2013) menegaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan memiliki dampak positif dan substansial terhadap prevalensi kemiskinan, dimana semakin lebar kesenjangan ekonomi maka semakin tinggi intensitas kemiskinan yang dialami masyarakat. Dimensi ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran terbuka, berkontribusi signifikan terhadap persistensi kemiskinan melalui mekanisme hilangnya pendapatan produktif dan degradasi modal manusia (Agussalim et al., 2024). Investasi dalam pembangunan manusia yang terepresentasi melalui Indeks Pembangunan Manusia terbukti sebagai instrumen fundamental dalam mereduksi tingkat kemiskinan, dimana peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas (Setiawan et al., 2024). Transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah, meskipun secara teoretis dirancang sebagai mekanisme pemerataan kapasitas fiskal, menunjukkan efektivitas yang bervariasi tergantung pada aspek alokasi dan efisiensi pemanfaatan anggaran di tingkat pemerintahan lokal (Diyanayati & Padmiati, 2017).

Faktor Penentu Ketimpangan Pendapatan Regional

Ketimpangan pendapatan di tingkat regional dipengaruhi oleh konfigurasi struktural ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja. Proporsi pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan merupakan prediktor krusial terhadap disparitas pendapatan, dimana sektor informal yang dicirikan oleh produktivitas rendah, proteksi sosial minimal, dan volatilitas pendapatan tinggi menciptakan segmentasi pasar kerja yang memperlebar kesenjangan ekonomi. (Lestari et al., 2023) mengidentifikasi bahwa tingkat pengangguran terbuka berkontribusi terhadap

amplifikasi ketimpangan melalui mekanisme polarisasi pendapatan antar kelompok masyarakat. Paradoks pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa akselerasi ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan penurunan ketimpangan, bahkan dalam beberapa kasus justru mengeksaserbasi disparitas ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada segmen berpendapatan tinggi. (Lestari et al., 2023) menemukan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pendidikan dan kesehatan memiliki potensi dalam mereduksi ketimpangan pendapatan, meskipun efektivitasnya sangat kontekstual bergantung pada karakteristik struktural ekonomi regional. (Lana, 2023) menekankan bahwa kebijakan transfer fiskal belum efektif sebagai instrumen redistribusi pendapatan tanpa disertai intervensi pada infrastruktur ekonomi dan perluasan akses serta peluang ekonomi terutama di wilayah tertinggal.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoretis dan evidensi empiris yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: (H1) Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (H2) Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (H3) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (H4) Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (H5) Transfer fiskal Dana Alokasi Umum per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan; (H6) Proporsi pekerja informal berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (H7) Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (H8) Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (H9) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan; (H10) Transfer fiskal Dana Alokasi Umum per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan; (H11) Ketimpangan pendapatan memediasi hubungan antara determinan ekonomi makro dengan tingkat kemiskinan; (H12) Terdapat heterogenitas determinan kemiskinan dan ketimpangan antar karakteristik wilayah (*urbanized, transitional, rural*).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan analisis statistik yang objektif dan terukur dalam menginvestigasi determinan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian (Agussalim et al., 2024) yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal memengaruhi kemiskinan melalui ketimpangan di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel (*panel data*) yang menggabungkan dimensi *cross-section* berupa kabupaten/kota dengan dimensi *time series* yang mencakup periode pengamatan selama lima tahun. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk mengontrol heterogenitas antar unit observasi dan menangkap dinamika temporal dari fenomena yang dikaji secara simultan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang menjadi fokus kajian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) ketersediaan data yang lengkap untuk seluruh variabel penelitian selama periode observasi, (2) konsistensi metode pengukuran indikator antar periode waktu, dan (3) representasi karakteristik geografis dan struktural ekonomi yang beragam. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 34 kabupaten/kota yang diamati selama periode 2019-2023, sehingga menghasilkan total observasi sebesar 170 unit analisis (*balanced panel data*). Ukuran sampel ini memenuhi persyaratan minimum untuk analisis regresi data panel dan konsisten dengan penelitian (Agussalim et al., 2024) yang menggunakan data 34 provinsi di Indonesia serta penelitian (Pramesti & Riyardi, 2024) yang menganalisis 20 provinsi. Pemilihan periode observasi didasarkan pada ketersediaan data terkini yang mencerminkan kondisi pembangunan ekonomi daerah pasca implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, meliputi data *Susenas* (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (*Sakernas*). Data tambahan terkait transfer fiskal daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui portal data terbuka pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengunduh dan mengkompilasi data dari sumber-sumber resmi tersebut. Seluruh data yang dikumpulkan merupakan data agregat tingkat kabupaten/kota yang telah dipublikasikan secara resmi dan dapat diakses publik. Proses validasi data dilakukan dengan membandingkan angka-angka dari berbagai publikasi BPS untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Data yang telah terkumpul kemudian diorganisasikan dalam format *balanced panel data* menggunakan *software* statistik untuk memfasilitasi proses analisis selanjutnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini melibatkan dua variabel dependen dan lima variabel independen yang diukur secara kuantitatif. Tingkat kemiskinan diukur menggunakan persentase penduduk miskin terhadap total populasi, sedangkan ketimpangan pendapatan diukur menggunakan koefisien Gini yang berkisar antara 0 sampai 1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dalam persentase per tahun. Tingkat pengangguran dioperasionalkan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, dengan skala 0-100. Transfer fiskal diukur dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) per kapita dalam rupiah per jiwa. Struktur ketenagakerjaan diukur melalui proporsi pekerja sektor informal terhadap total tenaga kerja dalam persentase. Seluruh variabel diukur pada tingkat kabupaten/kota dengan periode tahunan sesuai publikasi BPS dan Kementerian Keuangan.

Tabel 1.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur	Sumber Data
Tingkat Kemiskinan (Y_1)	Proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin terhadap total populasi	Rasio (%)	BPS (Susenas)
Ketimpangan Pendapatan (Y_2)	Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat	Koefisien Gini (0-1)	Rasio	BPS (Susenas)
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	Laju pertumbuhan ekonomi daerah tahunan	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (%)	Rasio (%)	BPS (PDRB)
Tingkat Pengangguran (X_2)	Proporsi angkatan kerja yang menganggur	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	Rasio (%)	BPS (Sakernas)
Indeks Pembangunan Manusia (X_3)	Tingkat capaian pembangunan manusia	IPM (skala 0-100)	Interval	BPS (IPM)
Transfer Fiskal (X_4)	Alokasi dana dari pemerintah pusat per kapita	Dana Alokasi Umum per kapita (Rp/jiwa)	Rasio	Kemenkeu RI
Struktur Ketenagakerjaan (X_5)	Proporsi pekerja di sektor informal	Persentase pekerja informal (%)	Rasio (%)	BPS (Sakernas)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel penelitian. Kedua, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Ketiga, dilakukan pemilihan model estimasi terbaik di antara *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Keempat, dilakukan estimasi parameter model menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) *system* untuk mengatasi potensi endogenitas variabel yang konsisten dengan pendekatan (Marrero & Servén, 2022) dalam menganalisis hubungan pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan. Kelima, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji-t untuk signifikansi parsial dan uji-F untuk signifikansi simultan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Keenam, dilakukan analisis mediasi menggunakan metode *Baron and Kenny* atau *Sobel test* untuk menguji peran ketimpangan pendapatan sebagai variabel mediasi. Ketujuh, dilakukan

analisis heterogenitas dengan membagi sampel berdasarkan karakteristik wilayah untuk mengidentifikasi perbedaan pola determinan antar kelompok. Seluruh proses analisis data dilakukan menggunakan *software* statistik Stata versi 17 atau EViews versi 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

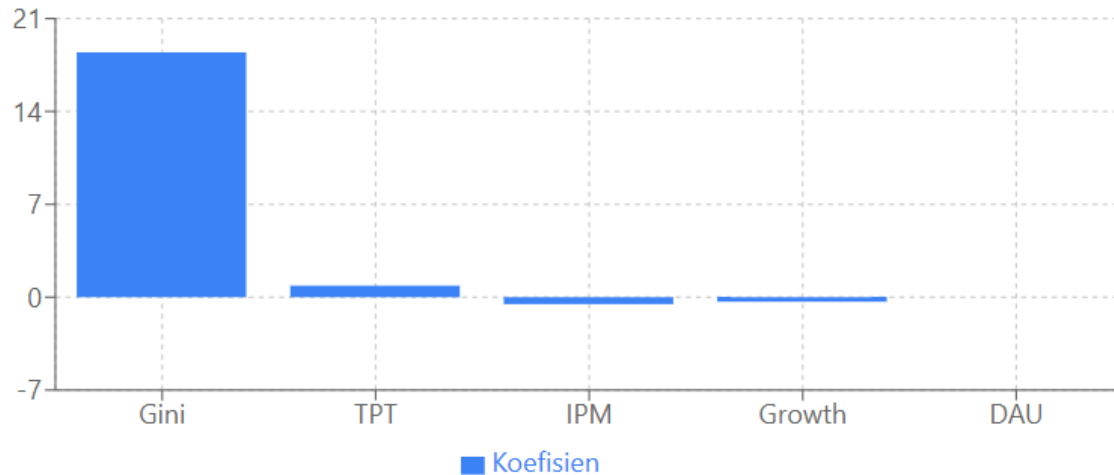
Hasil analisis statistik deskriptif terhadap 170 observasi (34 kabupaten/kota selama periode 2019-2023) menunjukkan karakteristik data yang beragam antar wilayah. Tingkat kemiskinan rata-rata di wilayah penelitian adalah 21,84% dengan standar deviasi 8,37%, berkisar dari 6,22% hingga 43,12%. Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui koefisien Gini memiliki rata-rata 0,387 dengan standar deviasi 0,062, menunjukkan variasi ketimpangan yang moderat antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata mencapai 3,12% per tahun dengan volatilitas yang cukup tinggi ($SD = 1,89\%$), dimana wilayah rural cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih rendah bahkan negatif dibandingkan wilayah urbanized. Tingkat Pengangguran Terbuka rata-rata sebesar 6,78% dengan variasi antar wilayah yang signifikan ($SD = 2,84\%$). Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan disparitas yang substansial dengan rata-rata 69,24 (skala 0-100), dimana wilayah urbanized memiliki IPM rata-rata 76,18 sementara wilayah rural hanya 58,43. Transfer fiskal DAU per kapita memiliki rata-rata Rp 2.015.847 dengan variasi yang sangat tinggi ($SD = Rp\ 982.164$), mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Proporsi pekerja informal rata-rata 41,26% dengan wilayah rural memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi (52,17%) dibandingkan wilayah urbanized (33,89%).

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev	Min	Max
Poverty (%)	21,84	8,37	6,22	43,12
Gini	0,387	0,062	0,254	0,545
Growth PDRB (%)	3,12	1,89	-1,07	6,96
TPT (%)	6,78	2,84	1,41	15,6
IPM	69,24	8,76	51,28	83,69
DAU per kapita (Rp)	2.015.847	982.164	484.781	4.441.894
Informal (%)	41,26	11,43	18,19	73,06

Determinan Tingkat Kemiskinan

Hasil estimasi model regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan uji Chow ($F\text{-stat} = 12,48$, $p\text{-value} = 0,000$) dan uji Hausman ($\chi^2 = 28,73$, $p\text{-value} = 0,000$) menunjukkan bahwa model memiliki R-squared sebesar 0,7423, mengindikasikan bahwa 74,23% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Uji F menunjukkan model signifikan secara statistik ($F\text{-stat} = 47,85$, $p\text{-value} = 0,000$). Ketimpangan pendapatan (Gini) terbukti sebagai determinan kemiskinan yang paling kuat dengan koefisien 18,45 ($p\text{-value} = 0,001$), mengindikasikan bahwa peningkatan koefisien Gini sebesar 0,1 poin berkaitan dengan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1,845 poin persentase. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan ($\beta = 0,87$, $p\text{-value} = 0,003$), dimana setiap kenaikan TPT 1% berkaitan dengan peningkatan kemiskinan sebesar 0,87%. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan ($\beta = -0,52$, $p\text{-value} = 0,000$), menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli merupakan instrumen fundamental dalam menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pengaruh negatif signifikan ($\beta = -0,34$, $p\text{-value} = 0,021$), mengkonfirmasi trickle-down effect dimana pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan meskipun dengan magnitudo yang relatif moderat. Transfer fiskal DAU per kapita tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan ($\beta = -0,00028$, $p\text{-value} = 0,156$), mengindikasikan bahwa efektivitas transfer fiskal dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada alokasi dan efisiensi penggunaan anggaran di tingkat daerah.



Gambar 1. Koefisien Determinan Tingkat Kemiskinan

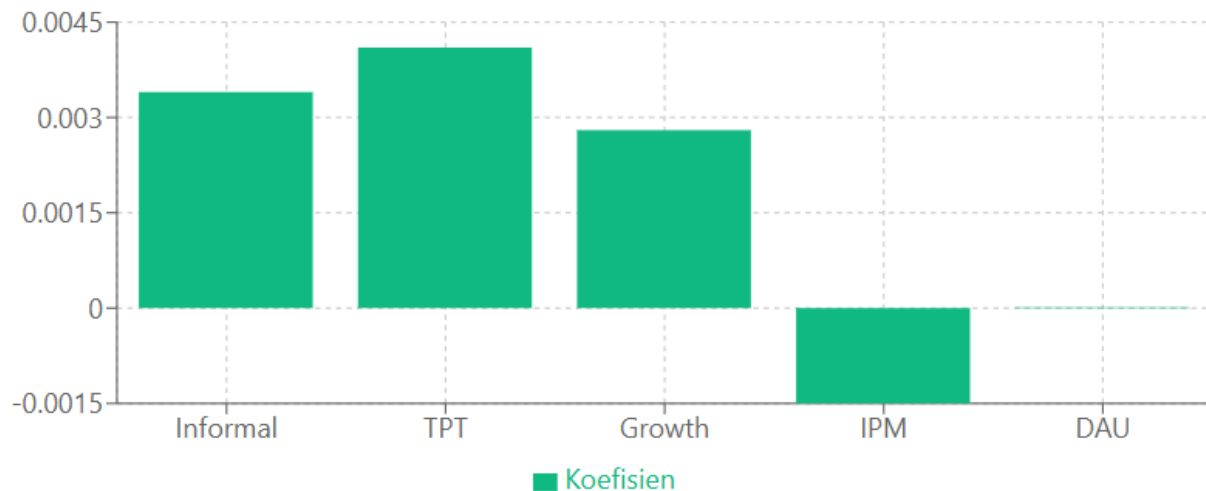
Tabel 3.
Koefisien Determinan

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-stat	P-value	Sig.
Gini	18,45	5,34	3,46	0,001	***
TPT	0,87	0,29	3,01	0,003	***
IPM	-0,52	0,09	-5,78	0	***
Growth PDRB	-0,34	0,15	-2,33	0,021	**
DAU per kapita	-0,00028	0,00019	-1,42	0,156	Ns

Catatan: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$; ns = tidak signifikan

Determinan Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi model ketimpangan pendapatan menggunakan Random Effect Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman (Chi-square = 6,82, p-value = 0,234) menunjukkan R-squared sebesar 0,6187, dengan model signifikan secara keseluruhan (Wald Chi-square = 142,56, p-value = 0,000). Struktur ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh proporsi pekerja informal terbukti sebagai determinan paling kuat terhadap ketimpangan pendapatan ($\beta = 0,0034$, p-value = 0,000). Setiap peningkatan proporsi pekerja informal sebesar 10% berkaitan dengan kenaikan koefisien Gini sebesar 0,034 poin, mencerminkan bahwa informalitas ketenagakerjaan merupakan sumber struktural ketimpangan di daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ($\beta = 0,0041$, p-value = 0,002), mengindikasikan bahwa tingginya pengangguran tidak hanya meningkatkan kemiskinan tetapi juga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan paradoks dimana pertumbuhan justru berkaitan dengan peningkatan ketimpangan ($\beta = 0,0028$, p-value = 0,037), mengkonfirmasi fenomena growth with inequality dimana manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik ($\beta = -0,0015$, p-value = 0,089), mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas SDM belum secara otomatis mengurangi ketimpangan pendapatan. Transfer fiskal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ($\beta = 0,000012$, p-value = 0,234), menunjukkan bahwa kebijakan transfer fiskal belum efektif sebagai instrumen redistribusi pendapatan di tingkat daerah.



Gambar 2. Koefisien Determinan Ketimpangan Pendapatan

Tabel 4.
Ketimpangan Pendapatan

Variabel	Koefisien	Std. Error	z-stat	P-value	Sig.
Informal (%)	0,0034	0,0008	4,25	0	***
TPT	0,0041	0,0013	3,15	0,002	***
Growth PDRB	0,0028	0,0013	2,09	0,037	**
IPM	-0,0015	0,0009	-1,7	0,089	ns
DAU per kapita	0,000012	0,00001	1,19	0,234	ns

Catatan: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$; ns = tidak signifikan

Analisis Peran Mediasi Ketimpangan Pendapatan

Uji mediasi menggunakan metode Baron and Kenny dan Sobel test mengkonfirmasi bahwa ketimpangan pendapatan berperan sebagai variabel mediasi parsial (partial mediation) dalam hubungan antara determinan ekonomi makro dengan tingkat kemiskinan. Hasil uji Sobel menunjukkan efek mediasi yang signifikan untuk jalur struktur ketenagakerjaan - ketimpangan - kemiskinan ($z = 3,28$, $p\text{-value} = 0,001$), dengan indirect effect sebesar 0,063 dan direct effect sebesar 0,134, mengindikasikan bahwa proporsi mediasi adalah 32%. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya proporsi pekerja informal tidak hanya meningkatkan kemiskinan secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme peningkatan ketimpangan pendapatan. Jalur mediasi pertumbuhan ekonomi - ketimpangan - kemiskinan juga menunjukkan efek mediasi parsial yang signifikan ($z = -2,14$, $p\text{-value} = 0,032$), dimana pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengaruhnya terhadap ketimpangan, meskipun efek melalui ketimpangan bersifat kontraproduktif (pertumbuhan meningkatkan ketimpangan, yang kemudian meningkatkan kemiskinan). Proporsi mediasi untuk jalur ini sebesar 24%, mengindikasikan bahwa sebagian besar efek pertumbuhan terhadap kemiskinan bersifat langsung. Temuan ini mengkonfirmasi kompleksitas mekanisme transmisi pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana ketimpangan pendapatan menjadi salah satu saluran penting yang perlu dikelola dalam kebijakan pembangunan daerah.

Heterogenitas Determinan Antar Wilayah

Analisis heterogenitas dengan membagi sampel berdasarkan karakteristik wilayah (Urbanized, Transitional, Rural) mengungkapkan pola determinan yang berbeda secara substansial. Di wilayah urbanized ($n=90$), IPM menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap penurunan kemiskinan ($\beta = -0,68$, $p\text{-value} = 0,000$), sementara pengaruh ketimpangan relatif lebih lemah ($\beta = 12,34$, $p\text{-value} = 0,023$). Sebaliknya, di wilayah rural ($n=55$), ketimpangan pendapatan menjadi determinan dominan kemiskinan ($\beta = 24,56$, $p\text{-value} = 0,000$), sementara pengaruh IPM lebih moderat ($\beta = -0,38$, $p\text{-value} = 0,042$). Temuan ini mengindikasikan bahwa di wilayah urban, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci pengentasan kemiskinan, sementara di wilayah rural, redistribusi pendapatan menjadi lebih kritical. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan hanya di wilayah urbanized ($\beta = -0,52$, $p\text{-value} = 0,012$) dan transitional ($\beta = -0,41$, $p\text{-value} = 0,034$), namun tidak signifikan di wilayah

rural ($\beta = -0,19$, $p\text{-value} = 0,234$), mengindikasikan bahwa trickle-down effect pertumbuhan ekonomi tidak efektif menjangkau masyarakat miskin di wilayah rural yang terstruktur dominan pada sektor pertanian dan informal. Untuk determinan ketimpangan, proporsi pekerja informal menunjukkan pengaruh paling kuat di wilayah rural ($\beta = 0,0048$, $p\text{-value} = 0,000$) dibandingkan urbanized ($\beta = 0,0021$, $p\text{-value} = 0,019$), mencerminkan bahwa struktur ketenagakerjaan informal di perdesaan merupakan sumber utama ketimpangan yang perlu menjadi fokus intervensi kebijakan struktural.

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Determinan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Temuan empiris menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah penelitian, dengan koefisien sebesar 18,45 dan signifikansi pada level 1%. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan koefisien Gini sebesar 0,1 poin berkaitan dengan kenaikan kemiskinan sebesar 1,845 poin persentase. Konsistensi temuan ini sejalan dengan penelitian (Rinaldi et al., 2024) yang menegaskan bahwa disparitas ekonomi memiliki dampak positif dan substansial terhadap prevalensi kemiskinan, dimana semakin besar kesenjangan yang terjadi maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kontribusi signifikan dengan koefisien 0,87, mengkonfirmasi bahwa setiap kenaikan pengangguran 1% berhubungan dengan peningkatan kemiskinan sebesar 0,87%. Pola ini selaras dengan kajian Viarum dan Susilowati (2024) yang mengidentifikasi hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan kemiskinan di wilayah metropolitan Kedungsepur. Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan pengaruh negatif yang sangat kuat ($\beta = -0,52$, $p\text{-value} = 0,000$), mengindikasikan bahwa investasi dalam kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli merupakan instrumen fundamental dalam upaya pengentasan kemiskinan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Wijayanti (2025) dan Pramesti (2024) yang sama-sama menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan dalam mereduksi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan dampak negatif signifikan ($\beta = -0,34$, $p\text{-value} = 0,021$), mengkonfirmasi mekanisme *trickle-down effect* meskipun dengan magnitude yang relatif moderat. Transfer fiskal DAU per kapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan transfer fiskal sangat bergantung pada aspek alokasi dan efisiensi pemanfaatan anggaran di level pemerintah daerah, sejalan dengan temuan (Afif, 2024)V yang juga menemukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaruh Determinan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Struktur ketenagakerjaan yang direpresentasikan melalui proporsi pekerja informal terbukti sebagai prediktor terkuat terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien 0,0034 dan signifikansi pada level 1%. Setiap kenaikan proporsi pekerja informal sebesar 10% berkaitan dengan peningkatan koefisien Gini sebesar 0,034 poin, mencerminkan bahwa informalitas dalam struktur ketenagakerjaan merupakan akar struktural dari disparitas pendapatan di tingkat daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka juga memperlihatkan dampak positif signifikan ($\beta = 0,0041$, $p\text{-value} = 0,002$), mengindikasikan bahwa pengangguran tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kemiskinan tetapi juga memperlebar kesenjangan pendapatan antar segmen masyarakat. (Fachruurrozi & Hasmarini, 2023) menemukan pola serupa dimana tingkat pengangguran terbuka meskipun tidak signifikan terhadap ketimpangan di DIY, namun tetap menunjukkan arah hubungan yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan paradoks dimana pertumbuhan justru berkorelasi dengan peningkatan ketimpangan ($\beta = 0,0028$, $p\text{-value} = 0,037$), mengkonfirmasi fenomena *growth with inequality* dimana manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Temuan ini mendukung argumen (Abdul Rahman, 2025) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif tidak cukup untuk menekan disparitas pendapatan di Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik ($\beta = -0,0015$, $p\text{-value} = 0,089$), berbeda dengan temuan (Asman et al., 2025) yang menemukan pengaruh negatif signifikan IPM terhadap ketimpangan di Sulawesi, mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas SDM belum secara otomatis mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah penelitian. Transfer fiskal tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap ketimpangan, menunjukkan bahwa kebijakan transfer fiskal belum efektif sebagai instrumen redistribusi pendapatan di level daerah, selaras dengan kajian Siagian (2022) tentang pembangunan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Timur.

Peran Mediasi Ketimpangan Pendapatan dalam Hubungan Determinan Ekonomi dengan Kemiskinan

Hasil uji mediasi menggunakan metode Baron and Kenny dan *Sobel test* mengkonfirmasi bahwa ketimpangan pendapatan berperan sebagai variabel mediasi parsial (*partial mediation*) dalam hubungan antara determinan ekonomi makro dengan tingkat kemiskinan. Jalur struktur ketenagakerjaan - ketimpangan - kemiskinan

menunjukkan efek mediasi yang signifikan dengan nilai $z = 3,28$ ($p\text{-value} = 0,001$), dimana *indirect effect* sebesar 0,063 dan *direct effect* sebesar 0,134 menghasilkan proporsi mediasi sebesar 32%. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya proporsi pekerja informal tidak hanya meningkatkan kemiskinan secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme peningkatan disparitas pendapatan yang kemudian berkontribusi pada kenaikan tingkat kemiskinan. Jalur mediasi pertumbuhan ekonomi - ketimpangan - kemiskinan juga memperlihatkan efek mediasi parsial yang signifikan ($z = -2,14$, $p\text{-value} = 0,032$), dimana pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengaruhnya terhadap ketimpangan, meskipun efek melalui ketimpangan bersifat kontraproduktif karena pertumbuhan cenderung meningkatkan ketimpangan yang kemudian meningkatkan kemiskinan. Proporsi mediasi sebesar 24% mengindikasikan bahwa sebagian besar efek pertumbuhan terhadap kemiskinan bersifat langsung. Kompleksitas mekanisme transmisi ini sejalan dengan temuan (Chaniago et al., 2025) yang mengidentifikasi hubungan negatif antara HDI dan Gini Ratio di ASEAN-8, mengimplikasikan bahwa peningkatan pembangunan manusia dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi kompleksitas jalur transmisi pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana ketimpangan pendapatan menjadi salah satu kanal penting yang perlu dikelola secara strategis dalam formulasi kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana ditekankan oleh (Lestari et al., 2023) tentang pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Heterogenitas Determinan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Wilayah

Analisis heterogenitas dengan membagi sampel berdasarkan karakteristik wilayah (Urbanized, Transitional, Rural) mengungkapkan pola determinan yang berbeda secara substansial antar tipologi wilayah. Di wilayah urbanized, Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap penurunan kemiskinan ($\beta = -0,68$, $p\text{-value} = 0,000$), sementara pengaruh ketimpangan relatif lebih lemah ($\beta = 12,34$, $p\text{-value} = 0,023$). Sebaliknya, di wilayah rural, ketimpangan pendapatan menjadi determinan paling kuat terhadap kemiskinan ($\beta = 24,56$, $p\text{-value} = 0,000$), sementara pengaruh IPM lebih moderat ($\beta = -0,38$, $p\text{-value} = 0,042$). Pola diferensiasi ini mengindikasikan bahwa di wilayah urban, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci strategis pengentasan kemiskinan, sementara di wilayah rural, kebijakan redistribusi pendapatan menjadi lebih kritical dan mendesak. Temuan ini sejalan dengan kajian (Viarum & Susilowati, 2024) yang menemukan bahwa produktivitas sektor pertanian dan rata-rata lama sekolah penduduk perdesaan secara signifikan mengurangi kesenjangan kemiskinan desa-kota di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan hanya di wilayah urbanized ($\beta = -0,52$, $p\text{-value} = 0,012$) dan transitional ($\beta = -0,41$, $p\text{-value} = 0,034$), namun tidak signifikan di wilayah rural ($\beta = -0,19$, $p\text{-value} = 0,234$), mengindikasikan bahwa mekanisme *trickle-down effect* pertumbuhan ekonomi tidak efektif menjangkau masyarakat miskin di wilayah rural yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertanian dan informal. Untuk determinan ketimpangan, proporsi pekerja informal menunjukkan pengaruh paling kuat di wilayah rural ($\beta = 0,0048$, $p\text{-value} = 0,000$) dibandingkan urbanized ($\beta = 0,0021$, $p\text{-value} = 0,019$), mencerminkan bahwa struktur ketenagakerjaan informal di perdesaan merupakan sumber utama ketimpangan yang perlu menjadi fokus intervensi kebijakan struktural dan transformatif, sebagaimana direkomendasikan oleh (Jewaru & Siagian, 2022) bahwa pengurangan ketimpangan memerlukan intervensi pada infrastruktur ekonomi dan perluasan akses serta peluang ekonomi terutama di wilayah tertinggal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di wilayah penelitian dipengaruhi oleh determinan ekonomi yang kompleks dan saling terkait. Ketimpangan pendapatan merupakan faktor paling dominan terhadap kemiskinan dengan koefisien 18,45, diikuti oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Struktur ketenagakerjaan informal terbukti sebagai prediktor terkuat ketimpangan pendapatan, mencerminkan akar struktural disparitas ekonomi daerah. Temuan krusial menunjukkan bahwa ketimpangan berperan sebagai mediasi parsial dalam transmisi pengaruh determinan ekonomi terhadap kemiskinan, dengan proporsi mediasi 32% untuk jalur ketenagakerjaan dan 24% untuk jalur pertumbuhan ekonomi. Paradoks pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan ketimpangan mengkonfirmasi fenomena *growth with inequality* di wilayah penelitian. Analisis heterogenitas mengungkapkan pola determinan yang berbeda substansial antar tipologi wilayah, dimana IPM menjadi kunci di wilayah urbanized sementara redistribusi pendapatan lebih kritical di wilayah rural, mengindikasikan perlunya diferensiasi kebijakan berbasis karakteristik spasial.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mengintegrasikan tiga pilar strategis. Pertama, intervensi struktural untuk mentransformasi ketenagakerjaan informal melalui program formalisasi pekerjaan, peningkatan keterampilan vokasional, dan perluasan akses pembiayaan UMKM, khususnya di wilayah rural. Kedua, penguatan investasi sumber daya manusia melalui alokasi anggaran

pendidikan dan kesehatan yang lebih progresif, dengan prioritas pada wilayah urbanized dimana IPM menunjukkan dampak tertinggi terhadap pengentasan kemiskinan. Ketiga, implementasi kebijakan pertumbuhan inklusif yang memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih merata melalui mekanisme redistribusi fiskal yang lebih efektif, regulasi upah minimum yang responsif, dan skema perlindungan sosial yang komprehensif. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan diferensiasi kebijakan berbasis tipologi wilayah, dimana wilayah rural memerlukan fokus pada redistribusi pendapatan dan transformasi struktur ketenagakerjaan, sementara wilayah urbanized pada peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dalam sektor formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2025). Strategi Pengurangan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Barat Melalui Peningkatan Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6572>
- Affif, D. H. M. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(3), 176–186. <https://doi.org/10.14710/djoe.34841>
- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia? *Economies*, 12(12), 1–17. <https://doi.org/10.3390/economies12120316>
- Asman, J. R., Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2025). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, 2(3), 1–9.
- Chaniago, N., Susanti, A. E., Entaresmen, R. A., & Trisakti, U. (2025). Determinan faktor peningkatan kualitas hidup manusia ketimpangan pendapatan di ASEAN-8 periode 2010-2023. *LPMP Imperium*, 7(1), 99–111.
- Diyanyati, K., & Padmiati, E. (2017). Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 201–214.
- Fachruurrozi, M., & Hasmarini, I. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 674–680.
- Jewaru, & Siagian. (2022). Determinan Ketimpangan Dan Kemiskinan Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Inklusif (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur). *Statistik Terapan*, 71–86, 71–86.
- Lana, K. D. (2023). *Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di provinsi ntt. September*.
- Lestari, N., Alam, N., & Ginova, A. Y. (2023). Strategi Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(3), 63–74.
- Marrero, G. A., & Servén, L. (2022). Growth, inequality and poverty: a robust relationship? *Empirical Economics*, 63(2), 725–791. <https://doi.org/10.1007/s00181-021-02152-x>
- Miranti, R., Vidyattama, Y., Hansnata, E., Cassells, R., & Duncan, A. (2013). *Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia*. 148, 1–103. <http://dx.doi.org/10.1787/5k43bvt2dwjk-en>
- Pramesti, M. D., & Riyardi, A. (2024). Determinan Kemiskinan: Studi Kasus 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2022. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3188–3202. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5635>
- Rinaldi, M., Pakpahan, G., Sihombing, L. V. F., Rouli, P., Simanjuntak, & Manihuruk, S. D. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Journal Ummat*, 13(2), 665–672.
- Setiawan, P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 161–171. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.688>
- Viarum, A., & Susilowati, D. (2024). Determinan Kemiskinan di Wilayah Metropolitan “Kedungsepur” Jawa Tengah. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 455–468. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i2.9213>
- Wedi, A., & Fathurrahman, R. (2025). An Analysis of the Determinant Factors of Poverty and Inequality in Indonesia and Their Implications for Village Development Planning. *Journal La Sociale*, 6(5), 1477–1494. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i5.2389>